



Adnan Pandu Praja

Wakil Ketua **KPK**

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

AGENDA

- **WAJAH INDONESIA**
- **KORUPSI INDONESIA**
- **PERAN SERTA**





1. WAJAH **INDONESIA**

INDONESIA TANAH SURGA



Hutan hujan tropis terluas **no. 3** di dunia

(Sassan Saatchi et al (2011). Benchmark map of forest carbon stocks in tropical regions across three continents." PNAS June 3, 2011)



Kaya dengan keanekaragaman hayati **15,3%** dari **5.131.100** keanekaragaman hayati di dunia terdapat di Indonesia



Penghasil timah no. **2** di dunia



Pengekspor batu bara terbesar no. **3** di dunia



Penghasil tembaga terbesar no. **3** di dunia



Pengekspor LNG terbesar no. **3** di dunia



Salah satu negara penghasil minyak bumi



Sudah makmurkah rakyat Indonesia?





Potret
Indonesiaku

Sensus Penduduk BPS (2013)

http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=2&id_subyek=13



Jumlah penduduk Indonesia:
252,1 juta jiwa



28.07 juta orang masih berada di bawah garis kemiskinan (**11,3%**)



7,17 juta orang masih menganggur (**5,92%**)

APBN 2014 (KEMENKEU)



Pendapatan: **Rp1.667,1 T**



Belanja: **Rp1.842,5 T (-175,4T)**

Hutang Negara Mei 2015 (KEMENKEU)



Hutang luar negeri Indonesia per Mei '14: **Rp 2.843 T**



Bunga: **Rp113,24 T/tahun**

Salah Kelola, Negara Rugi



Potret
Indonesiaku

- Tambang Grasberg di Mimika Papua:
Penghasil tembaga dan emas terbesar di dunia
- PT Freeport Indonesia:
Pengelola tambang Grasberg dengan kepemilikan saham → Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (AS): **81,28%**, Pemerintah Indonesia: **9,36%**, PT. Indocopper Investama: **9,36%**
- Penghasilan Freeport dalam setahun: **US\$ 4,1 M**
- Royalti untuk Pemerintah RI: **3,75%** (emas) & **1,5%-3,5%** (tembaga)
- Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (RPJMN 2010-2014):
183 kab merupakan daerah tertinggal. **27** kab berada di Provinsi Papua (terbanyak) **70%** Berada di kawasan Indonesia Bagian Timur.
- Persentase angka kemiskinan di Papua (BPS Maret 2013):
31,1% > rata-rata nasional (**11,3%**)



2. KORUPSI **INDONESIA**



Corruption by Need
(terpaksa karena **kebutuhan**)

Corruption by Greed
(memaksa karena **keserakahan**)

Corruption by Design
(UU, Kebijakan Negara, Izin-
Izin Pemerintah yang **dibisniskan**)

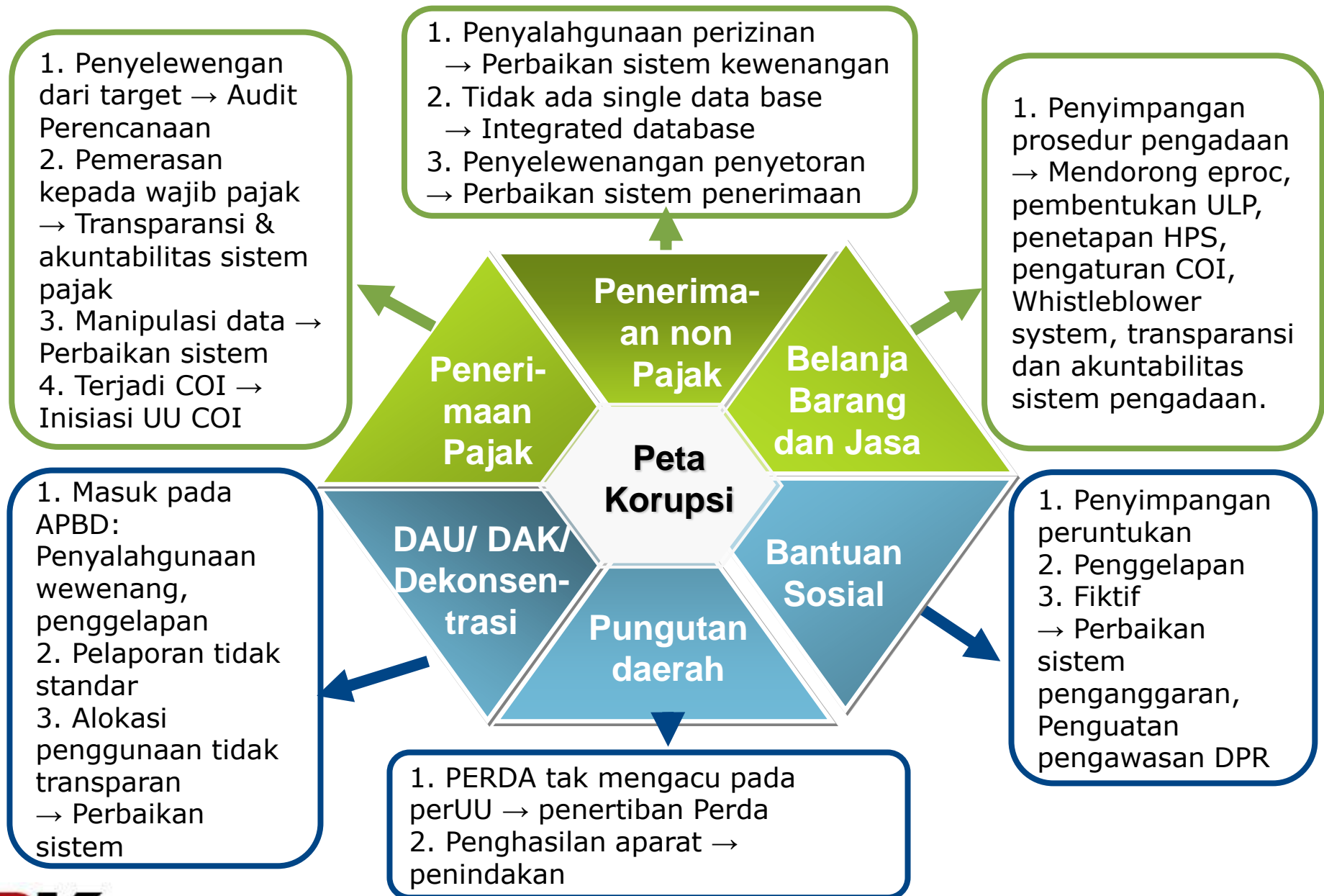
1

2

3

Niat terkait dengan Perilaku/karakter

Peta **Korupsi** di Indonesia



11

Titik Rawan

Korupsi

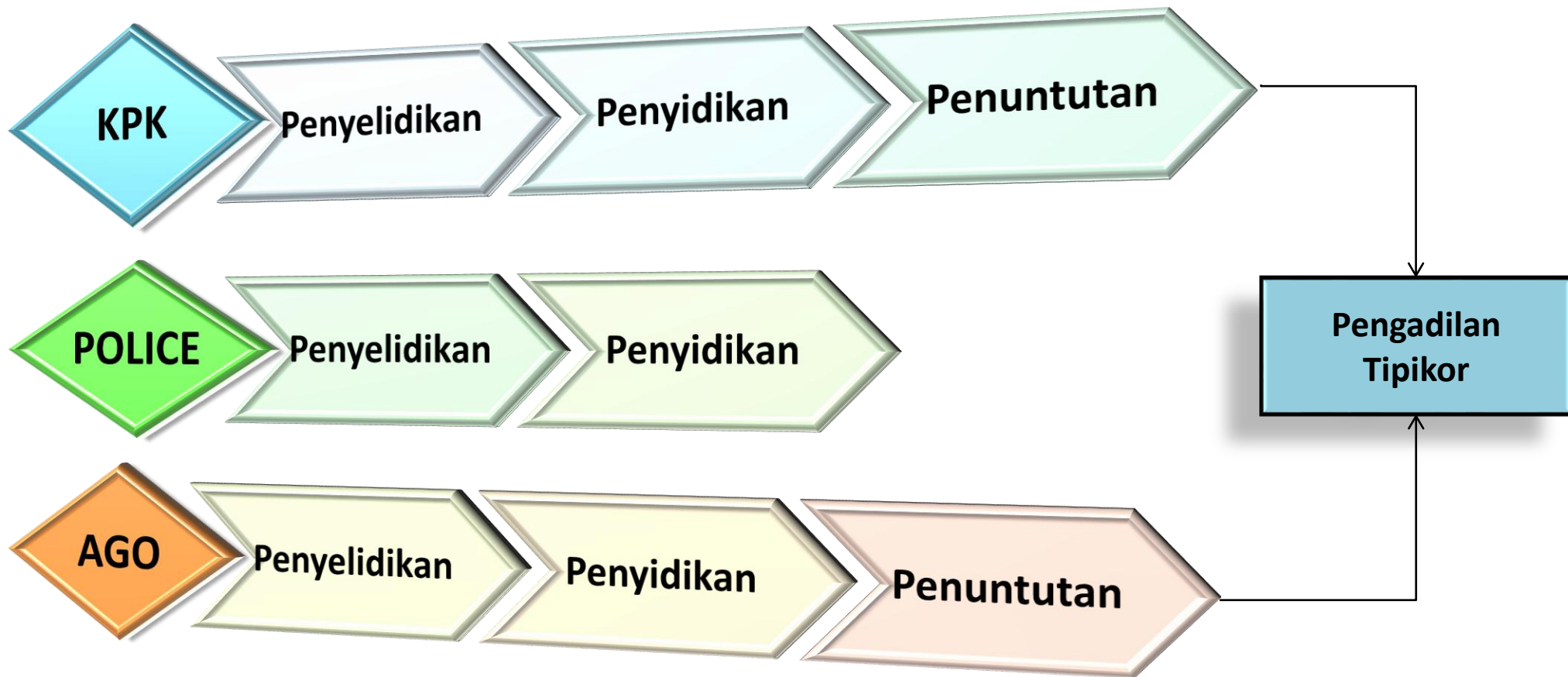
1. sektor APBN/APBD
2. sektor pengadaan barang dan jasa
3. sektor pajak & transaksi izin usaha pertambangan (IUP)
4. sektor kepabeanan dan bea cukai
5. sektor migas & penyelenggaraan ibadah haji
6. sektor keuangan dan perbankan
7. sektor BUMN/BUMD
8. sektor pendapatan/penerimaan negara
9. sektor pelayanan umum
10. sektor instansi/lembaga beralokasi anggaran besar
11. Putusan Pengadilan

LEMBAGA INDEPENDEN





Criminal Justice System



KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Strategy Map - KPK

Stake holder



Internal Process



L and G



Financial





Strategi Pencegahan

Identifikasi

- Studi Pencegahan Korupsi berbasis keluarga
- Naskah Sistem Integritas Nasional
- Survei Integritas Sektor Publik 2014
- Survei Pemahaman integritas Pemilu 2014
- Pengukuran LHKPN

Sistem

- Kajian Privatisasi Infrastruktur Transportasi Strategis
- Pengaturan LHKPN dan Gratifikasi
- Kajian SDA (Kehutanan dan Perkebunan, Kelautan, Pertambangan dan Minerba)

Individu

- Program pendidikan anti Korupsi pada setiap jenjang pendidikan
- Program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
- Kampanye anti Korupsi kepada masyarakat

Pemantauan

- Pemantauan Action Plan Kajian Fungsi DPR
- Pemantauan Kajian: Daging Sapi
- Pemantauan Action Plan Kajian SDA
- Pemantauan Action Plan BPJS Kesehatan

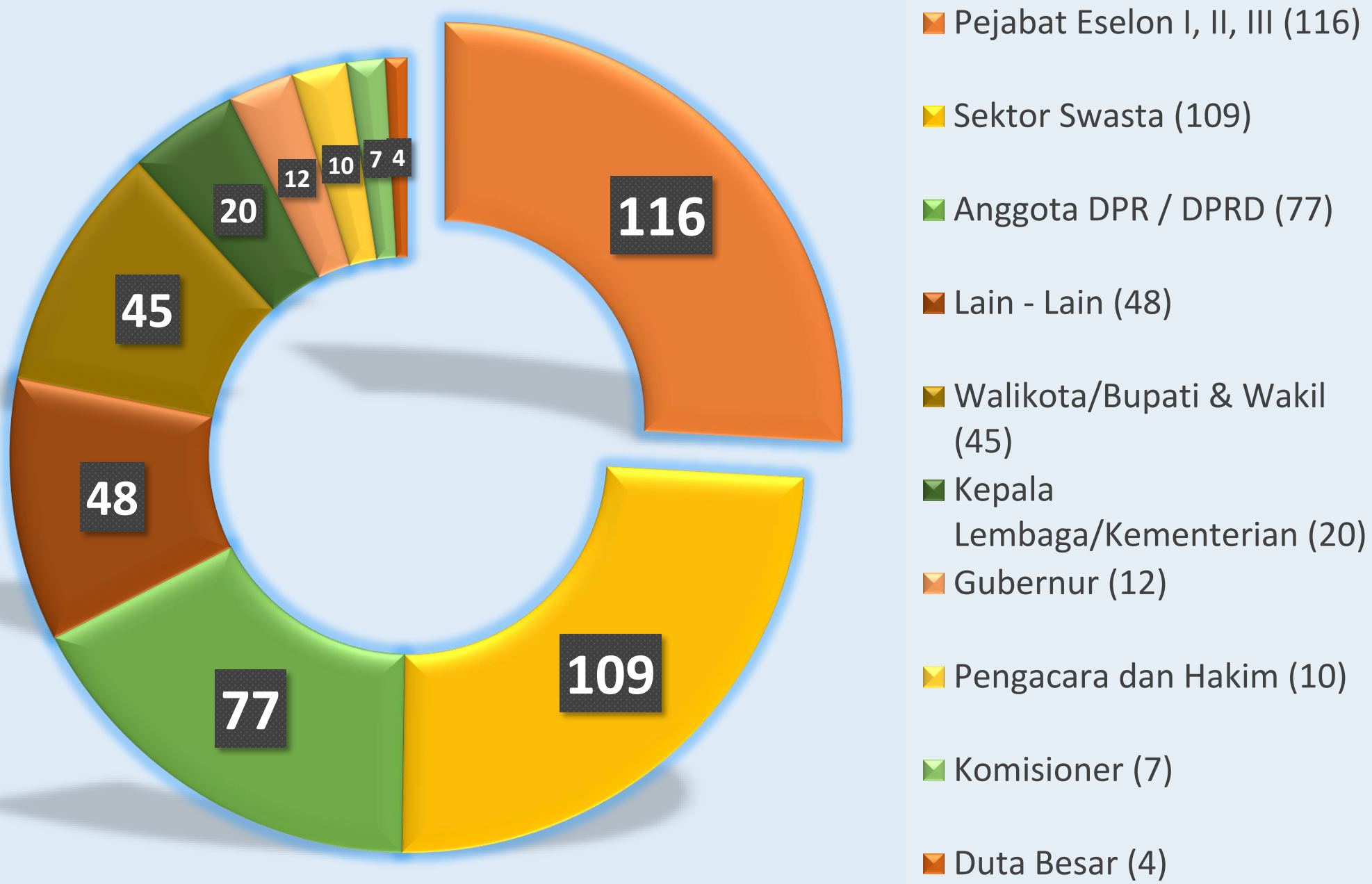
Koordinasi & Supervisi

- Inspeksi mendadak
- Korsup Minerba
- Korsup Dana Pendidikan
- Penertiban Barang Milik Negara
- Korsup Pencegahan

I
N
T
E
R
V
E
N
S
I



Kasus Korupsi : Profesi / Jabatan (2004 – April 2015)





3. PERAN SERTA

Kita semua harus menjadi Subjek Pemberantasan Korupsi

*Clean Government
&
Good Governance*

**Aparat
Pemerintah**

**Sektor
Swasta**

**Masyarakat
Mahasiswa**

*Good Corporate Governance
Anti bribe*

Peran Serta
Tidak Permisif

PP 71 Th. 2000:

Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Ormas, atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komitmen Semua Pihak termasuk Perguruan Tinggi

Mahasiswa = Duta **Anti** Korupsi



1. Pribadi teladan
2. Penyebar virus anti korupsi
3. Kontrol sosial

TERIMA KASIH




Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920

Telp: (021) 2557 8300

www.kpk.go.id

www.acch.kpk.go.id

 facebook.com/KomisiPemberantasanKorupsi

 twitter.com/KPK_RI

 kpk.go.id/kanalkpk

 kpk.go.id/kanalkpk/radio/

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:

Direktorat Pengaduan Masyarakat

PO BOX 575 Jakarta 10120

Telp: (021) 2557 8389

Faks: (021) 5289 2454

SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Email: pengaduan@kpk.go.id

Informasi Gratifikasi:

Direktorat Gratifikasi

Telp: (021) 2557 8440

Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Pelayanan Informasi Publik

Hubungan Masyarakat:

Telp: (021) 2557 8498

Faks: (021) 5290 5592

Email: informasi@kpk.go.id

Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):

Direktorat LHKPN

Telp: (021) 2557 8396

Email : informasi.lhkpn@kpk.go.id